



EVALUASI INTERNAL PROGRAM DAN KEGIATAN

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

2018



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Jemur Andayani No.1 Surabaya (60236)
Telp. (031) 8477551, Faks (031) 8477404
[http ://www.bkd.jatimprov.go.id](http://www.bkd.jatimprov.go.id)

EVALUASI INTERNAL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kinerja (Renja) merupakan aktivitas perencanaan pengambil keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan, cara pencapaiannya dikaitkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada waktu tahun berjalan.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan pada pemikiran nawa cita, delapan area perubahan reformasi birokrasi, dan RPJMD Jawa Timur serta Perubahan Renstra BKD Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang berkompeten di dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur atau Pegawai Negeri Sipil Daerah berupaya terus menerus untuk dapat menjadi lembaga yang amanah, professional, dan akuntabel di dalam pengelolaan manajemen SDM Aparatur. Oleh karena itu untuk dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah merencanakan program dan kegiatan yang mendukung **“Misi yang ke-4 (empat) Bapak Gubernur Jawa Timur yaitu Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik”**, melalui penetapan 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu: (1) Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensinya, (2) Meningkatnya Kompetensi ASN di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (3) Meningkatnya kualitas database kepegawaian pegawai ASN yang akurat, dan (4) Meningkatnya disiplin dan penilaian kinerja pegawai ASN, yang terencana, terukur, dan terintegrasi.

1. Tujuan;

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun oleh Badan Kepegawaian Jawa Timur Provinsi Jawa Timur mengacu pada isu-isu dan analisis strategis terkait dengan misi yang ke 4 (empat) Bapak

Gubernur Jawa Timur (percepatan reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik) , yaitu:

- a. Mewujudkan penataan dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan;
- b. Mewujudkan sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi;
- c. Mewujudkan pegawai ASN yang disiplin, integritas dan berkinerja tinggi.

2. Sasaran

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan hasil indentifikasi potensi permasalahan internal dan eksternal untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis BKD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur.

Dengan mempertimbangkan misi Gubernur Jawa Timur, terutama untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, maka ditetapkan indikator-indikator keberhasilan sasaran strategis ini mencakup Persentase penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dilaksanakan melalui penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi sehingga didalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, oleh karena itu pada sasaran didukung indikator-indikator keberhasilan yang mencakup; (1) Persentase ASN yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur memenuhi kekurangan pegawai yang berdasarkan pada hasil pemetaan; (2) Persentase ASN yang dialihfungsikan dari jabatan fungsional umum atau administrasi ke jabatan fungsional tertentu dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa banyak pegawai dengan jabatan fungsional umum atau administrasi yang berlebihan di seluruh SKPD (hasil pemetaan) dialihfungsikan menjadi jabatan fungsional tertentu untuk memenuhi kekurangan jabatan fungsional tertentu dan rekrutmen CPNS dengan sistem CAT.

- b. Meningkatnya Kompetensi ASN di Lingkungan Provinsi Jawa Timur

Dalam usaha memberikan pelayanan publik yang prima maka diperlukan SDM aparatur yang kompeten. Salah satu indikator untuk menilai kompetensi tersebut

adalah dengan melakukan uji kompetensi terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari hasil uji kompetensi tersebut, ASN Provinsi Jawa Timur akan dipetakan dalam 4 kuadran kompetensi dan keahlian.

c. Meningkatnya kualitas data pegawai ASN yang Akurat.

Pelaksanaan akurasi database pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan secara kontinyu dan partisipatif, artinya masing-masing ASN dapat melakukan updating data kepegawaiannya pada aplikasi e-Master (Manajemen ASN Terpadu) yang nantinya akan memudahkan pengelola kepegawaian baik di OPD maupun di BKD dalam memberikan pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat dan efisien.

d. Meningkatnya disiplin dan penilaian kinerja pegawai ASN

Pelaksanaan pelayanan secara online dalam pemberian penghargaan SATYA LANCANA KARYA SATYA dimaksudkan untuk lebih meningkatkan motivasi pegawai ASN yang bertujuan tercapainya SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera dengan indikator perilaku kerja dari tingkat kehadiran pegawai ASN, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN karena kriteria ASN yang berkualitas salah satunya disiplin, taat hukum, dan tidak melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran peraturan kepegawaian dan kode etik dan perilaku pegawai dan juga pelanggaran terkait masalah pidana yang dilakukan oleh ASN, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh ASN dan meningkatnya kedisiplinan pegawai ASN melalui penggunaan presensi elektronik yang terhubung dengan sistem database kepegawaian ASN.

2. Program

Program merupakan kebijakan dalam rangka untuk mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menetapkan program utama/prioritas dan program pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Utama

1. Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur(308.51)

Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur dengan indikator program/outcome yaitu Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik. Program ini didukung kegiatan-kegiatan yaitu:

1.1. Penegakan Disiplin (308.51.001)

Indikator kegiatan/output yaitu

1. Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin
2. Persentase pelanggaran disiplin pegawai selama 1 (satu) Tahun
3. Persentase kehadiran pegawai tepat waktu selama 1 (satu) Tahun

1.2. Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja (308.51.002)

Indikator kegiatan/output yaitu

1. Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja
2. Persentase pemberian penghargaan tanda jasa bagi pegawai ASN

1.3. Pemberdayaan ASN (308.51.003)

1. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN
2. Jumlah peserta pembekalan bagi pegawai ASN yang menjelang masa purna tugas.

2. Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya KORPRI (308.52)

Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya KORPRI dengan indikator program/outcome yaitu Persentase peningkatan pembinaan anggota KORPRI. Program ini didukung kegiatan-kegiatan yaitu:

2.1. Penguatan Jiwa Korsa (308.52.001)

Indikator kegiatan/output yaitu

1. Jumlah laporan rangkaian HUT KORPRI
2. Jumlah laporan Paduan Suara
3. Jumlah laporan Pelatihan Paskibra

2.2. Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota KORPRI (308.52.002)

Indikator kegiatan/output yaitu

1. Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum;
2. Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota KORPRI;
3. Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga.

2.3. Pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Sekretariat KORPRI (308.52.003)

Indikator kegiatan/output yaitu Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran.

3. Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN (3.08.53)

Program penataan dan pelayanan pegawai ASN dengan indikator program/outcome yaitu

1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi.
2. IKM Pelayanan Kepegawaian

Program ini didukung kegiatan-kegiatan yaitu:

3.1. Penataan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi (3.08.53.001).

Indikator kegiatan/output yaitu

1. Persentase pengisian jabatan lowong secara terbuka
2. Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu
3. Persentase Rekomendasi Pejabat Struktural Hasil Evaluasi Tim Baperjakat

3.2. Pelayanan Kenaikan Pangkat (308.53.002)

Indikator kegiatan/output yaitu IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN.

3.3. Pelayanan pensiun dan perpindahan (308.53.003)

1. Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi
2. IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN

4. Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN (3.08.54)

Indikator kinerja Program atau *out come* pada program ini adalah Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat

dipertanggungjawabkan, dengan kegiatan dan indikator kinerja output sebagai berikut:

4.1. Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai (308.54.001)

Indikator Output/kegiatan dari kegiatan ini adalah persentase database kepegawaian yang lengkap.

4.2. Perencanaan kepegawaian dan formasi (308.54.002)

Indikator kegiatan/output yaitu Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi.

4.3. Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN (308.54.003)

Indikator kegiatan/output yaitu :

1. Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai dan non ASN
2. Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN
3. Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT
4. Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN

5. Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (3.08.55)

Program pengembangan aparatur sipil Negara dengan indikator program/outcome yaitu Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi Program ini didukung kegiatan-kegiatan yaitu:

5.1. Pembinaan Karir (308.55.001)

Indikator kegiatan/output yaitu

1. Jumlah dokumen pelaporan kegiatan Pembinaan karir
2. Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir
3. Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar

5.2. Penilaian Kompetensi (308.55.002)

Indikator kegiatan/output yaitu Jumlah dokumen kegiatan penilaian kompetensi.

5.3. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (308.55.003)

Indikator kegiatan/output yaitu Jumlah dokumen kegiatan Penyusunan standar kompetensi jabatan.

b. Program Pendukung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (3.08.01)

Indikator kinerja program atau output adalah Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor, dengan kegiatan sebagai berikut:

1.1. Pelaksanaan administrasi perkantoran (3.08.01.019)

Indikator output dari kegiatan ini adalah Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (3.08.02).

Indikator Kinerja Program/outcome adalah Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi, dengan kegiatan dan indikator output sebagai berikut:

2.1. Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (3.08.02.012)

Indikator output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

2.2. Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (3.08.02.031)

Indikator output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (3.08.07).

Indikator kinerja program atau out come adalah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1.1 Koordinasi dan konsultasi pemerintah daerah (3.08.07.001)

Indikator output dari kegiatan ini adalah Jumlah Konsultasi.

1.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3.08.07.002)

Indikator output dari kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal.

4. Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan (3.08.08).

Indikator Kinerja Program atau outcome adalah ini persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu, dengan kegiatan dan indikator output sebagai berikut:

4.1 Penyusunan dokumen perencanaan (3.08.08.001)

Indikator output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan

4.2 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program (3.08.08.002)

Indikator output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan hasil rencana program dan anggaran

4.3 Penyusunan laporan pengelolaan keuangan (3.08.08.004)

Indikator output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

5. Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD Tahun 2018.

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	KET.
3.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	85 %	
3.08.01.019	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	
3.08.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	
3.08.02.012	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	135 unit	
3.08.02.031	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	135 unit	
3.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	
3.08.07.001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	60 kali	
3.08.07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	1. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 2. Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	124 Orang 124 Orang	
3.08.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	
3.08.08.001	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dok	
3.08.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	6 dok	
3.08.08.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	14 dok	
3.08.51	Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur	Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik	51.154 pegawai	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	KET.
3.08.51.001	Penegakan Disiplin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin 2. Persentase Pelanggaran Disiplin dalam 1 tahun 3. Persentase kehadiran pegawai tepat waktu selama 1 (satu) Tahun 	<p>7 dok</p> <p>5 %</p> <p>100 %</p>	
3.08.51.002	Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja 2. Persentase pemberian penghargaan tanda jasa bagi pegawai ASN 	<p>6 dok</p> <p>100 %</p>	
3.08.51.003	Pemberdayaan ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN 2. Jumlah peserta pembekalan bagi pegawai ASN yang menjelang masa purna tugas 	<p>6 dok</p> <p>200 orang</p>	
3.08.52	Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya KORPRI	Persentase peningkatan pembinaan anggota KORPRI	87%	
3.08.52.001	Penguatan Jiwa Korsia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan rangkaian HUT KORPRI 2. Jumlah laporan Paduan Suara 3. Jumlah laporan Pelatihan Pleton Upacara 	<p>1 lap</p> <p>1 lap</p> <p>1 lap</p>	
3.08.52.002	Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota KORPRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum dan ditindaklanjuti 2. Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota KORPRI 3. Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga anggota KORPRI 	<p>85%</p> <p>1 lap</p> <p>250 orang</p>	
3.08.52.003	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	100%	
3.08.53	Program Penataan dan Pelayanan	1. Persentase pegawai ASN	98%	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	KET.
	Pegawai ASN	yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi 2. IKM Pelayanan Kepegawaian	85	
3.08.53.001	Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi	1. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim Baperjakat 2. Persentase Pengisian Jabatan Lowong secara terbuka 3. Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu	100% 100% 100%	
3.08.53.002	Pelayanan kenaikan pangkat	IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	85%	
3.08.53.003	Pelayanan pensiun dan perpindahan	1. Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi 2. IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	85% 85	
3.08.54	Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN	Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	99%	
3.08.54.001	Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Persentase database kepegawaian yang lengkap	98%	
3.08.54.001	Perencanaan kepegawaian dan formasi	Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi	2 dok	
3.08.54.001	Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN	1. Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai dan non ASN 2. Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN 3. Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT 4. Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN	100% 1 lap 1 dok 1 kali / keg	
3.08.55	Program Pengembangan Aparatur	Persentase pegawai ASN yang	90%	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	KET.
	Sipil Negara (ASN)	memenuhi syarat untuk uji kompetensi		
3.08.55.001	Pembinaan Karir	1. Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pembinaan karir 2. Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir 3. Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar	6 dok 80% 100%	
3.08.55.002	Penilaian Kompetensi	1. Jumlah dokumen kegiatan Penilaian kompetensi	7 dok	
3.08.55.003	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah dokumen kegiatan Penyusunan standar kompetensi jabatan	4 dok	

BAB II

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM DALAM RENJA SKPD DAN PERUBAHAN RENSTRA SKPD

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 telah mengacu dan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019. Berikut perbandingan indikator kinerja pada Perubahan Rencana strategis (Renstra) BKD dengan Rencana kinerja (renja) tahun 2018 sebagai berikut:

PERUBAHAN RENSTRA BKD 2015-2019		RENJA 2018		EVALUASI				KET
PROGRAM	TOLAK UKUR/ INDIKATOR	PROGRAM	TOLAK UKUR/ INDIKATOR	PROGRAM		TOLAK UKUR/ INDIKATOR		
				YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1	2	3	4	5		7		8
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Nilai IKM Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor</i>	<i>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor</i>	V		V		<i>Sin-kron dan program pendu-kung</i>
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi</i>	<i>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</i>	<i>Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</i>	V		V		<i>Sin-kron dan program pendu-kung</i>
<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase kelembagaan yang tepat fungsi</i>	<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	<i>Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi</i>	V		V		<i>Sin-kron dan program pendu-kung</i>
<i>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</i>	<i>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</i>	V		V		<i>Sin-kron dan program pendu-kung</i>
<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</i>	<i>Persentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif, transparan dan akuntabel</i>	<i>Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)</i>	<i>Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi</i>		V		V	<i>Sin-kron dan program prioritas</i>

PERUBAHAN RENSTRA BKD 2015-2019		RENJA 2018		EVALUASI				KET
PROGRAM	TOLAK UKUR/ INDIKATOR	PROGRAM	TOLAK UKUR/ INDIKATOR	PROGRAM		TOLAK UKUR/ INDIKATOR		
				YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1	2	3	4	5		7		8
<i>Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen kepegawaian</i>	<i>Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan</i>	Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN	1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi 2. IKM Pelayanan Kepegawaian	V		V	V	<i>Sin-kron dan program prioritas</i>
<i>Program pengembangan Data Informasi</i>	<i>Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan</i>	Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN	Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	V		V		<i>Sin-kron dan program prioritas</i>
		Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur	Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik					Nomenklatur program baru sesuai dengan SOTK Baru
		Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya KORPRI	Persentase peningkatan pembinaan anggota KORPRI					Nomenklatur program, baru sesuai dengan SOTK Baru

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 dibandingkan dengan rencana kinerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018 hampir semua sinkron, dan sesuai dengan hampir semua rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, namun ada program dan kegiatan yang baru dan harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 sudah diakomodir di dalam Perubahan Rencana Strategis (renstra BKD 2014-2019).

BAB III

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2018

Capaian kinerja merupakan hasil dari pengukuran perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi yang tepat guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat dievaluasi, dianalisa dan selanjutnya disimpulkan tingkat keberhasilan atau tingkat pencapaian target kinerja yang ditetapkan terlihat pada pencapaian target indikator kinerja program dan indikator kegiatan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2018 ini, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2019. Pada tahun anggaran 2018 analisis capaian kinerja dilakukan terhadap dua hal, yakni analisis capaian kinerja terhadap masing-masing program dan kegiatan serta analisis capaian terhadap masing-masing sasaran.

Berikut ditampilkan capaian kinerja sampai dengan triwulan IV dikaitkan dengan penyerapan anggaran dapat di lihat pada tabel berikut ini.

TABEL: 3.1
CAPAIAN KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2018

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Kinerja Keuangan			Unit yang bertanggung-jawab dan Ket
	Tolak Ukur	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu s/d PA APBD	Realisasi sampai dengan TW IV	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program pelayanan administrasi perkantoran, sasaran meningkat-nya pelayanan intern BKD	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	100	100 %	3,375,581,148	3,246,855,591	96.18	Sekretariat

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Kinerja Keuangan			Unit yang bertanggung jawab dan Ket	
	Tolak Ukur	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu s/d PA APBD	Realisasi sampai dengan TW IV	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pelaksanaan administrasi perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100 %	100 %	100 %	3,375,581,148.	3,246,855,591	96.18		
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur,	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	100 %	6,673,863,695	6,558,682,170	97.30	Sekretariat	
Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	135 unit	165	122 %	2,814,164,850	2,753,042,150	95.52		
Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	135 unit	165	122 %	3,859,698,845	3,805,640,020	98.60		
Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah daerah,	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	100 %	100 %	2,313,010,157	2,207,907,355	95.46	Sekretariat	
Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	60 kali	85	141 %	1,261,698,625	1,179,774,740	93.51		
Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	a. Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM b. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal.	124 124	Orang Orang	255 orang 150 orang	170 % 100 %	1,051,311,532	1,028,132,615	97.80	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Kinerja Keuangan			Unit yang bertanggung jawab dan Ket
	Tolak Ukur	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu s/d PA APBD	Realisasi sampai dengan TW IV	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program pe-nyusunan, Pengendali-an, dan evaluasi do-kumen pe-nyelengga-raan pem-erintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	516,250,000	507,836,238	98.37	Sekretariat
Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	5 dok	100 %	129,000,000	128,845,443	99.88	
Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program	Jumlah dokumen laporan hasil rencana program dan anggaran	6 dok	6 dok	100 %	189,750,000	189,639,295.	99.94	
Penyusunan laporan pengelolaan keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	14 dok	14 dok	100 %	197,500,000	189,351,500	95.87	
Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur	Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur	51.154 Pegawai	46.038 pegawai	90 %	2,550,000,000.	2,544,156,039.	99.77	Bidang DKP
Penegakan Disiplin	1. Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin	7 dok			708,525,000	704,210,955.	99.39	Bidang DKP
	2. Persentase Pelanggaran Disiplin dalam 1 tahun	10 %	10 %	100 %				
	3. Persentase Kehadiran Pegawai tepat waktu selama 1 tahun	100 %	98 %	98 %				
Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	1. Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	6 dok	10 dok	111 %	1,253,725,000.	1,253,069,894.	99.95	Bidang DKP

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Kinerja Keuangan			Unit yang bertanggung jawab dan Ket
	Tolak Ukur	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu s/d PA APBD	Realisasi sampai dengan TW IV	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Persentase Pemberian Penghargaan tanda jasa bagi pegawai ASN	100 %	100 %	100 %				
Pemberdayaan ASN	1. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN	4 dok	5 dok	125 %	587,750,000.	586,875,190.	99.85	Bidang DKP
	2. Jumlah peserta pembekalan bagi pegawai ASN yang menjelang masa purna tugas	200 orang	200 orang	100 %				
Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya KORPRI	Persentase peningkatan pembinaan anggota KORPRI	87 %	93,2 %	107,13 %	5,035,905,000.	5,012,555,315.	99.54	UPT KORPRI
Penguatan Jiwa Korsa	1. Jumlah laporan rangkaian HUT KORPRI 2. Jumlah laporan Paduan Suara 3. Jumlah laporan Pelatihan Pleton Upacara	1 Lap 1 Lap 1 Lap	1 1 1	100 % 100 % 100 %	3,892,629,400.	3,878,570,876.	99.64	UPT KORPRI
Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota KORPRI	1. Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum dan ditindaklanjuti 2. Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota KORPRI 3. Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga anggota KORPRI	85 % 1 Lap 200 orang	80 % 1 Lap 200 orang	94 % 1 Lap 100 %	480,795,000	479,876,795	99.81	UPT KORPRI

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Kinerja Keuangan			Unit yang bertanggung jawab dan Ket
	Tolak Ukur	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu s/d PA APBD	Realisasi sampai dengan TW IV	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	100 %	100 %	100 %	662,480,600.	654,107,644.	98.74	UPT KORPRI
Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN	1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi 2. IKM Pelayanan Kepegawaian	98 % 85	94,47 % 84,5	96,6 % 99 %	3,000,000,000.	2,834,191,798.	94.47	Bidang Mutasi
Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi	1. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim Baperjakat 2. Persentase Pengisian Jabatan Lowong secara terbuka 3. Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu	100 % 100 % 100 %	100 % 75 % 96,66 %	100 % 75 % 96,66 %	1,405,945,000.	1,298,614,915.	92.37	Bidang Mutasi
Pelayanan kenaikan pangkat	IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	85 %	84,3 %	99 %	932,357,012.	897,793,645.	96.29	Bidang Mutasi
Pelayanan pensiun dan perpindahan	1. Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi 2. IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota	100 % 85	100 % 85	100 % 100 %	661,697,988.	637,783,238.	96.39	Bidang Mutasi

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Kinerja Keuangan			Unit yang bertanggung jawab dan Ket
	Tolak Ukur	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu s/d PA APBD	Realisasi sampai dengan TW IV	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN	Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	99 %	98,7 %	99,7 %	8,163,000,000.	6,110,733,322.	74.86	Bidang P3DASI
Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Persentase database kepegawaian yang lengkap	98 %	98,7 %	103 %	1,463,000,000.	1,250,876,852.	85.50	Bidang P3DASI
Perencanaan kepegawaian dan formasi	Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi	2 dok	2 dok	100 %	550,000,000	487,804,736.	88.69	Bidang P3DASI
Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN	1. Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai dan non ASN 2. Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN 3. Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT 4. Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN	100 %	82,8 %	82,8 %	6,150,000,000.	4,372,051,734.	71.09	Bidang P3DASI

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Kinerja Keuangan			Unit yang bertanggung jawab dan Ket
	Tolak Ukur	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu s/d PA APBD	Realisasi sampai dengan TW IV	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi	90 %	87 %	96,6 %	2,800,000,000.	2,722,310,010.	97.23	Bidang Pengembangan
Pembinaan Karir	1. Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pembinaan karir	6 Dok	6 Dok	100 %	1,000,000,000.	973,016,180	97.30	Bidang Pengembangan
	2. Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir	80 %	80 %	100 %				
	3. Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar	100 %	100 %	100 %				
Penilaian Kompetensi	Jumlah dokumen kegiatan Penilaian kompetensi	7 dok	5 dok	71,4 %	1,070,000,000.	1,021,900,200.	95.50	Bidang Pengembangan
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah dokumen kegiatan Penyusunan standar kompetensi jabatan	4 dok	4 dok	100 %	730,000,000.	727,393,630	99.64	Bidang Pengembangan

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada Triwulan IV pada umumnya semuanya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena tahun anggaran 2018 telah berakhir. Sedangkan pada program pendukung atau anggaran eks rutin capaian kinerjanya rata-rata mencapai **97,22%**.

Pada program-program utama atau program prioritas BKD Provinsi Jawa Timur yang langsung berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur capaian kinerja program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur

Capaian kinerja program dengan indikator Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik, sampai dengan Triwulan IV adalah **46.038** pegawai, karena kegiatan telah diselesaikan pada Triwulan IV. Pada Tahun 2018 Program ini dianggarkan Rp2,550,000,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp2,544,156,039.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar **99,77%**, dengan didukung kegiatan-kegiatan yaitu:

- a. **Penegakan Disiplin (308.51.001)**, Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 708,525,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 704,210,955.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,39 %, dengan didukung 3 (tiga) Indikator kegiatan/output yaitu Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin, Persentase pelanggaran disiplin pegawai selama 1 (satu) Tahun, Persentase kehadiran pegawai tepat waktu selama 1 (satu) Tahun yang keseluruhan dilaksanakan pada Triwulan IV.
- b. **Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja (308.51.002)** Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 1,253,725,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp1,253,069,894.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 99.95 %, dengan didukung 2 (dua) Indikator kegiatan/output yaitu Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja dan Persentase pemberian penghargaan tanda jasa bagi pegawai ASN, yaitu salah satu sub kegiatan adalah Penyelenggaraan Pelepasan Pegawai Menjelang Masa Purna Tugas sebanyak 600 orang. Termasuk diantaranya adalah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan bintek/pelatihan operator Manajemen Kinerja (Remunerasi), sebagaimana dalam Pergub Jawa Timur Jatim No. 126 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- c. **Pemberdayaan ASN (308.51.003)** Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp587,750,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp 586,875,190.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 99.85 %, dengan didukung 2 (dua) Indikator kegiatan/output yaitu Jumlah dokumen

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN dan Jumlah peserta pembekalan bagi pegawai ASN yang menjelang masa purna tugas sebanyak 80 orang telah dilaksanakan.

2. Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya KORPRI (308.52),

Capaian kinerja program indikator program/outcome yaitu Persentase peningkatan pembinaan anggota KORPRI, sampai dengan Triwulan IV adalah 93,2 % , karena programtelah diselesaikan pada Triwulan IV. Pada Tahun 2018 Program ini dianggarkan Rp. 5,035,905,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 5,012,555,315.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar **99.54 %**, dengan didukung kegiatan-kegiatan yaitu:

- a. **Penguatan Jiwa Korsa (308.52.001)**, Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 3,892,629,400.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 3,878,570,876.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 99.64 %, dengan didukung 3 (tiga) Indikator kegiatan/output yaitu Pelaksanaan Kegiatan MTQ KORPRI Provinsi Jawa Timur dan Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan HUT KORPRI Provinsi Jawa Timur pada bulan Desember 2018yang keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan pada Triwulan IV.
- b. **Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota KORPRI (308.52.002)**, Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp480,795,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp 479,876,795.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 99.81 %, dengan didukung 3 (tiga) Indikator kegiatan/output yaitu :
 - 1) Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum sebesar 80%;
 - 2) Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota KORPRI sebanyak 1 (satu) laporan;
 - 3) Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga sebanyak 200 orang.
- c. **Pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Sekretariat KORPRI (308.52.003)**, Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp662,480,600.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 654,107,644.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 98.74 %, dengan didukung 1 (satu) Indikator kegiatan/output yaitu Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran yaitu sebesar **100 %**.

3. Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN (3.08.53)

Capaian kinerja program dengan indikatorPersentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi dan IKM Pelayanan Kepegawaian, sampai dengan Triwulan IV adalah

94,47% dan IKM dengan nilai **84,5**. Pada Tahun 2018 Program ini dianggarkan Rp. 3,000,000,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 2,834,191,798.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 94.47 %, dengan didukung kegiatan-kegiatan yaitu:

a. Penataan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi (3.08.53.001), Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 1,405,945,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 1,298,614,915.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 92.37 %, dengan didukung 3 (tiga) Indikator kegiatan/output yaitu :

- 1) Persentase pengisian jabatan lowong secara terbuka sebesar 100 %
- 2) Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu sebesar 96 %
- 3) Persentase Rekomendasi Pejabat Struktural Hasil Evaluasi Tim Baperjakat sebesar 75 %

b. Pelayanan Kenaikan Pangkat (308.53.002), Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 932,357,012.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 897,793,645.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 96.29 %, dengan didukung 1 (satu) Indikator kegiatan/output yaitu IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN dengan nilai sebesar **84,3** yang pelaksanaannya telah diselesaikan pada Triwulan IV. Dengan rincian pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kenaikan Pangkat Less Paper periode April 2018 sebanyak 2.736 SK untuk pegawai Provinsi Jawa Timur dan 3.460 SK untuk pegawai Kab/Kota se Jawa Timur, sedangkan untuk Kenaikan Pangkat Less Paper periode Oktober 2018 sebanyak 4.531 SK untuk pegawai Provinsi Jawa Timur dan 4.248 SK untuk pegawai Kab/Kota se Jawa Timur.

c. Pelayanan pensiun dan perpindahan (308.53.003), Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 661,697,988.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 637,783,238.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 96.39 %, dengan didukung 2 (dua) Indikator kegiatan/output yaitu :

- 1) Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi, sebesar **100** %, dengan rincian Perpindahan Masuk Provinsi Jawa Timur sebanyak 108 orang, perpindahan keluar Provinsi Jawa Timur sebanyak 247 orang;
- 2) IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN dengan nilainya sebesar **85** dengan penerbitan SK Pensiun sebanyak 2.207 SK untuk pegawai ASN yang pensiun sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018.

4. Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN (308.54), capaian kinerja program indikator program/outcome yaitu Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, sampai dengan Triwulan IV adalah **98,7 %**. Pada Tahun 2018 Program ini dianggarkan Rp. 8,163,000,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 6,110,733,322.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 74.86 %, dengan didukung kegiatan-kegiatan yaitu:

a. Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai (308.54.001), Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 1,463,000,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 1,250,876,852.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 85.50 %, dengan didukung 1 (satu) Indikator kegiatan/output yaitu persentase database kepegawaian yang lengkap sebesar **98,7 %**.

b. Perencanaan kepegawaian dan formasi (308.54.002), Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 550,000,000,00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 487,804,736.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 88.69 %, dengan didukung 1 (satu) Indikator kegiatan/output yaitu Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi yang telah terealisasi 2 Dokumen sampai dengan akhir Triwulan IV.

c. Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN (308.54.003), Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 6,150,000,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp. 4,372,051,734.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 71.09 %, dengan didukung 4 (empat) Indikator kegiatan/output yaitu :

- 1) Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai dan non ASN sebesar 82,8 %.
- 2) Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN sebanyak 1 laporan.
- 3) Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT sebanyak 1 laporan.
- 4) Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN sebanyak 1 laporan.
- 5) Pelaksanaan Seleksi Rekrutmen Pegawai, yaitu CPNS Tahun 2018, sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Tahun 2018, telah berlangsung dan dimulai pada tanggal 28 September 2018 hingga tanggal 3 Desember 2018, dengan informasi sebagai berikut :
 - ✓ Jumlah Alokasi formasi sebanyak 2.065 dengan rincian sebagai berikut:
 - Guru : 826 formasi terdiri dari 88 jabatan
 - Kesehatan : 797 formasi terdiri dari 73 jabatan
 - Teknis : 442 formasi terdiri dari 71 jabatan

- ✓ Jumlah pelamar yang mendaftar seleksi CPNSD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 63.186 dengan rincian: Memenuhi Syarat : 52.321 (mengikuti SKD), Tidak Memenuhi Syarat : 10.865.
- ✓ Jumlah Peserta yang Lolos Seleksi CPNS Tahun 2018 sebanyak 1.971 orang dengan proses Pemberkasan yang akan dilakukan pada bulan Januari 2019.

5. Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (3.08.55), capaian kinerja program indikator program/outcome yaitu Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi, sampai dengan Triwulan IV adalah **87 %** , karena.sepenuhnya telah dilaksanakan pada Triwulan IV. Pada Tahun 2018 Program ini dianggarkan Rp. 2,800,000,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasiRp2,722,310,010.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 97.23 %, dengan didukung kegiatan-kegiatan yaitu:

a. Pembinaan Karir (3.08.55.001), Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 1,000,000,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp973,016,180.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 97.30 %, dengan didukung 3 (tiga) Indikator kegiatan/output yaitu :

- 1) Jumlah dokumen pelaporan kegiatan Pembinaan karir sebanyak 1 dokumen telah diselesaikan
- 2) Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir sebesar 80,6 %
- 3) Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar sebesar 100 %

b. Penilaian Kompetensi (308.55.002), Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 1,070,000,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp1,021,900,200.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar95.50 %, dengan didukung 1 (satu) Indikator kegiatan/output yaituJumlah dokumen kegiatan penilaian kompetensi telah diselesaikan 1 dokumen dengan perincian pelaksanaan kegiatan Review Assessment untuk Talent Pool bagi Calon Sekda Kab/Kota se Jawa Timur sebanyak 98 orang, Assessment untuk Pekabat Pengawas sebanyak 450 orang, Pengiriman Diklat sebanyak 165 orang, Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi ASN mutasi masuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak. 40 orang.

c. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (308.55.003), Pada Tahun 2018 dianggarkan Rp. 730,000,000.00 sampai dengan Triwulan IV terealisasiRp727,393,630.00 Atau capaian kinerja keuangan sebesar 99.64 %, dengan didukung 1 (satu) Indikator kegiatan/output yaituPenyusunan standar kompetensi jabatan dengan telah diselesaikan 4 dokumen.

Dari penjabaran Program dan Kegiatan diatas hampir semua target keseluruhan mencapai 100 % dan telah diukur keseluruhan kinerjanya yang berakhir pada Triwulan IV.

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu belum maksimalnya Penataan Pegawai dan Pengembangan Kompetensi Pegawai karena hal itu berproses terus menerus hingga tercapai Penataan dan Pengembangan Pegawai yang baik dan sesuai dengan Kompetensinya. Berikut disajikan permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait dengan program-program dan kegiatan prioritas/utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur :

Berikut disajikan permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait dengan program-program dan kegiatan prioritas/utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

1. **Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur** permasalahannya adalah sebagai berikut :
 - a. Lemahnya penegakan disiplin pegawai, dalam hal ini sanksi bagi pegawai yang belum melaporkan harta kekayaan, LP2P, maupun datang terlambat belum optimal;
 - b. Lemahnya audit internal, baik itu menyangkut permasalahan kepegawaian atau audit kepegawaian (non keuangan) maupun permasalahan keuangan;
 - c. Lemahnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan pegawai yang terlambat hadir, hanya dikenakan sanksi pemotongan tunjangan tapres saja;
 - d. Belum ada standar kesejahteraan yang sesuai prestasi/kinerja masing-masing PNS;
 - e. Belum adanya standart hasil kinerja sesuai jabatan;

2. **Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya KORPRI**, tidak ada kendala, karena semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan sebagai puncak kegiatan yaitu Rangkaian peringatan HUT KORPRI telah dilaksanakan pada Triwulan IV dan berlangsung dengan Sukses.

3. **Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN** permasalahannya adalah sebagai berikut :
 - a. Belum adanya standart kompetensi (manajerial, tehnis, sosio kultural, dan pemerintahan) di dalam proses penataan dan pendistribusian pegawai;
 - b. Pelaksanaan penataan dan pendistribusian pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan di masing-masing SKPD.;

- c. Belum semua PNS ditetapkan dalam jabatan fungsional umum yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Timur atau pejabat yang berwenang;
 - d. Adanya keterlambatan pengiriman usulan kenaikan pangkat khususnya pangkat golongan ruang (IV/c) ke atas yang disebabkan tidak lengkapnya persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Banyaknya PNSD dalam jabatan fungsional tertentu yang pensiun.
4. **Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN** permasalahannya adalah sebagai berikut :
- a. Belum adanya perencanaan yang ideal akan kebutuhan JFU (jabatan pelaksana) maupun JFT;
 - b. Penyusunan kebutuhan PNS berdasarkan acuan form BKN dengan jabatan Pergub No. 76/2016 sudah selesai untuk Tahun 2016 sedangkan penyusunan kebutuhan berbasis aplikasi e-formasi ver. 3.0 di lingkungan Perangkat daerah masih belum sepenuhnya tercapai dikarenakan pelimpahan SMA/SMK dari Kab/kota ke Provinsi;
 - c. Penyesuaian nama jabatan pelaksana berdasarkan acuan Permenpan 25/2016 jo Permenpan 18/2018 sudah selesai disusun hanya tinggal beberapa Perangkat Daerah yang belum selesai dikarenakan adanya usulan kebutuhan Jabatan baru diluar Permenpan dan harus diusulkan ke Menpan paling lambat akhir tahun 2017;
 - d. Penataan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) yang semakin besar jumlahnya, terkait adanya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
5. **Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara** permasalahannya adalah sebagai berikut :
- a. Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum adanya badan sertifikasi, sehingga untuk menjadikan PNS yang memiliki kompetensi di bidang IT dan bersertifikasi masih belum optimal. Hal ini sesuai dengan UU No 5 tahun 2004 dan UU No 23 tahun 2014 ada 4 (empat) kompetensi yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan ujian dinas/ujian penyesuaian masih belum adanya standart kelulusan, sehingga ujian hanya sebatas legalitas dari pelaksanaan ketentuan yang ada;
 - c. Data dari Analisa hasil DIKLAT masih dalam proses pengolahan dan verifikasi dalam penyusunan hasil dampak DIKLAT baik jabatan administrator sampai dengan jabatan pelaksana;

- d. Belum adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karir pegawai;
- e. Standart kompetensi baru dilaksanakan untuk jabatan setara eselon II dan III, Eselon IV dan staf masih dalam proses.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan hasil evaluasi kinerja triwulanan khususnya pada Triwulan IV tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan maupun kinerja Badan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis tahun 2014 -2019 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Secara umum bahwa Persentase rata-rata pencapaian kinerja pada program yang mendukung kinerja BKD Provinsi Jawa Timur atau program eks rutin adalah **97,22 %**, artinya semua rencana target kinerja yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan hasil capaian untuk program prioritas atau program utama yang mendukung kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, belum semua tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Anggaran yang mendukung semua program dan kegiatan (belanja langsung) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi dana APBD tahun 2018 untuk belanja langsung sebesar Rp. 24.689.610.000,00 dan setelah PAPBD sebesar **Rp.50.202.231.086,00** sampai dengan Triwulan IV (akhir Desember 2018) terealisasi sebesar **Rp46.655.692.471,00** atau capaian kinerja keuangan **92,93%** atau dengan predikat capaian kerjanya adalah "Sangat Tinggi". Artinya sampai dengan triwulan IV ini pelaksanaan program dan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Rekomendasi atas pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan IV

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan perbaikan didalam menentukan dan menetapkan nomenklatur program yang sesuai dibidang kepegawaian, dan mensikronkan kegiatan-kegiatan untuk mendukung program yang ditetapkan
- b. Melakukan penyusunan pedoman dan standart yang terkait dengan pelaksanaan e-SKP dan evaluasi penilaian kinerja pegawai yang akan menduduki jabatan struktural, baik itu standart

kompetensi jabatan, standart hasil kinerja dari suatu jabatan, maupun standart penilaian yang objektif bagi pegawai yang akan menduduki jabatan struktural.

- c. Melakukan evaluasi/review terhadap kebijakan pelaksanaan pemberian tunjangan prestasi daerah (remunerasi), tentang pelaksanaan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan PP 53 tahun 2010 dan pengukuran capaian kinerja berdasarkan e-SKP.
- d. Melakukan perbaikan di dalam pengelolaan SDM Aparatur mulai dari perencanaan, penataan, pendistribusian, dan evaluasi kinerja, bahkan semua pelayanan kepegawaian dengan system on line system, sehingga pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKD Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi yang baik dari pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara sertifikasi pelayanan atau Award (BKN Award).
- e. Melakukan upaya peningkatan pelayanan kepegawaian melalui penyempurnaan fasilitas pelayanan, dan peningkatan kualitas SDM Aparatur terutama dibidang penyusunan laporan keuangan, dan IT.
- f. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, terkait database kepegawaian, sehingga database kepegawaian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kenaikan pangkat on line system, e-SKP, Tim Penilai Kinerja, pensiun otomatis, dan pembayaran tunjangan-tunjangan yang terkait dengan database kepegawaian.
- g. Mengoptimalkan peranan BKD Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja SKPD Triwulan IV Tahun 2018 disusun sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaiwan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Januari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ANOM SURAHNO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19630524 199803 1 001

LAMPIRAN : Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi (Format 17 Kolom) sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2018.